

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Deni Invantoro

140810271

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Deni Invantoro

140810271

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2019

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Deni Invantoro
NPM/NIP : 140810271
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsure PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 03 Agustus 2019

DENI INVANTORO
140810271

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Deni Invantoro

140810271

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Agustus 2019

Dian Efriyenti S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Pada beberapa daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya dana yang sudah di alokasikan untuk pembangunan manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya dibutuhkan agar hidup secara layak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan adalah data *time series*, dengan populasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Batam dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Panel tahun 2010-2017. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di kota Batam. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Batam. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.952 yang menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Batam sebesar 95.2 % dan sisanya sebesar 4.8 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

In some areas Human Development Index (HDI) is an important thing to assess the success of funds that allocated for human development. Among the many choices, the most important choice to get a long life and healthy, to have knowledge, and to have access to the resources needed to live properly. Therefore, this study aims to analyze the influence of poverty levels and government expenditure on education on the human development index. The analysis technique used is multiple linear regression. The type of data used is time series data, with populations sourced from the Batam City Central Bureau of Statistics and the Regional Financial and Asset Management Agency of Batam City. The sample used in this study is the Panel data for 2010-2017. Based on the results of testing the hypothesis, it was found that the poverty level had a positive effect on the human development index in the city of Batam. While government spending on education has a positive and significant effect on the human development index in the city of Batam. The determination coefficient value is 0.952 which indicates that the influence of poverty levels and government expenditure on education on the human development index in Batam city is 95.2% and the remaining 4.8% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords: Poverty Level, Government Expenditures in Education, Human Development Index.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Riski Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Dian Efriyenti S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Baru Harahap S.E., M.Ak. selaku pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saya motivasi dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Keluarga tercinta atas kasih sayang, doa dan semangat yang selalu diberikan;
8. Meidina, Fandi, Julian, Digo, Rido, Doni, Putri, Rinal, Edo, Hasan, Imam, Anrisal, Helni dan sahabat seperjuangan terima kasih atas semua kenangan dan kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya;
9. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, semoga nantinya menjadi orang yang sukses semuanya;
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memperlancar jalannya penelitian dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 03 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Konsep Teoritis.....	11
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.1.2 Tingkat Kemiskinan	15
2.1.2.1 Indikator kemiskinan.....	17
2.1.2.2 Penyebab Kemiskinan	18
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.3.1 Alokasi Dana Bidang Pendidikan	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Hipotesis	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Operasional Variabel	33
3.2.1 Variabel Independen.....	33
3.2.2 Variabel Dependen.....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.3.1 Populasi	34
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data.....	37
3.5 Metode Analisis Data	37
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik Regresi	38
3.5.2.1 Uji Normalitas	38
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	39
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas	40
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	41
3.5.3 Uji Pengaruh.....	41
3.5.4 Uji Hipotesis.....	43
3.5.4.1 Uji t (secara parsial)	43
3.5.4.2 Uji F (Secara simultan)	44
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi R^2	45
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	46
3.6.1 Lokasi Penelitian	46
3.6.2 Jadwal Penelitian.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Uji Statistik Deskriptif	48
4.1.2 Uji Asumsi Klasik Regresi	50
4.1.2.1 Uji Normalitas	50
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas	52
4.1.2.3 Uji Heteroskedastitas.....	54
4.1.2.4 Uji Autokorelasi	55

4.1.3 Uji Pengaruh.....	56
4.1.4 Uji Hipotesis.....	57
4.1.4.1 Uji Simultan (Uji F)	57
4.1.4.2 Uji Statistik (Uji t).....	59
4.1.4.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)	61
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	62
4.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	64
4.2.3 Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN 1. PENDUKUNG PENELITIAN	
LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	50
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas.....	52

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1 Penghitungan IPM	14
Rumus 3.1 Persamaan regresi.....	43

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan	3
Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum IPM	13
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Operasional Variabel	34
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.2 Tabel Kolmogrov-Smirnov	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Park Glejser.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Pengaruh	56
Tabel 4.7 Hasil Uji F	58
Tabel 4.8 Hasil Uji t	59
Tabel 4.9 Hasil Uji R^2	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk menikmati lingkungan yang mendukung. Di sebuah Negara diperlukan adanya tolak ukur untuk mengukur Negara tersebut tergolong Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. *HDI* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan setiap daerah yang dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) (Ariza, 2016).

IPM dibangun melalui 3 pendekatan dimensi dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi ekonomi digunakan indikator kemampuan daya

beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Wiliantara & Budiasih, 2016).

Selain IPM diperlukan adanya penilaian terhadap tingkat kemiskinan. Negara tersebut bisa dikatakan Negara maju apabila tingkat kemiskinan suatu Negara tersebut tergolong rendah. Meningkatnya tingkat kemiskinan bisa disebabkan oleh lajunya pertumbuhan yang mengakibatkan tidak sebandingnya penghasilan yang minim dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, pengangguran yang menyebabkan tidak adanya penghasilan yang didapat, serta tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah (Winarti, 2014).

Pendidikan menjadi salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah memegang peranan penting untuk mewujudkan pendidikan yang memadai bagi daerahnya, hal itu tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dana alokasi khusus yang

dianggarkan untuk Kota Batam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu tentunya membuat pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menjadi naik pula. Kenaikan anggaran tersebut seharusnya menjadi patokan untuk meningkatkan kualitas manusia melalui bidang pendidikan. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016).

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan IPM Di Kota Batam Tahun 2015-2017

Tahun	Bulan	Tingkat Kemiskinan	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	IPM
2015	MARET	5.2	Rp 491,678,451,403	79.19
	JUNI	5.2	Rp 524,412,848,479	79.24
	SEPTEMBER	5.1	Rp 557,147,245,555	79.29
	DESEMBER	5.1	Rp 589,881,642,631	79.34
2016	MARET	5.0	Rp 591,020,800,709	79.45
	JUNI	4.9	Rp 592,159,958,787	79.57
	SEPTEMBER	4.8	Rp 593,299,116,864	79.68
	DESEMBER	4.7	Rp 594,438,274,942	79.79
2017	MARET	4.7	Rp 552,215,263,876	79.91
	JUNI	4.7	Rp 509,992,252,810	80.03
	SEPTEMBER	4.8	Rp 467,769,241,744	80.14
	DESEMBER	4.8	Rp 425,546,230,678	80.26

Sumber: BPS Kota Batam (bps.go.id) dan BPKAD Kota Batam

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, Tingkat Kemiskinan mencapai angka 5.1% sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat masing – masing menjadi Rp 589.881.642.631,- dan 79.34%. Selanjutnya di tahun 2016, Tingkat Kemiskinan menurun menjadi 4.7%, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan naik menjadi Rp 594.438.274.942,- serta Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 79.79%. Di tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2017 Tingkat Kemiskinan naik menjadi 4.8%, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan menurun menjadi Rp 425.546.230.678,- sedangkan Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat menjadi 80.26%.

Angka tingkat kemiskinan di Kota Batam selalu mengalami penurunan setiap tahunnya (tabel terlampir) yang menyebabkan adanya perubahan pada angka Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Kota Batam. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya juga menjadi faktor meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan ekonomi di Kota Batam terpenuhi, maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahannya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat di Kota Batam.

Pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil, yaitu seperti penelitian menurut (Sanggolongan, Rumat, & Siwu, 2015) yang dilakukan di Sulawesi Utara dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Disektor

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia menyimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian menurut (Dewi, 2017) yang berjudul Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang di lakukan di Provinsi Riau menyimpulkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian – penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan penelitian tersebut dengan memasukan variabel Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas hidup khususnya di Kota Batam. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.

2. Kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
3. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka masih menggantungkan adanya dana dari Pemerintah Pusat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari masalah yang meluas, maka peneliti membatasi permasalahan dari latar belakang masalah sebelumnya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal – hal sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 – 2017 di Kota Batam.
2. Variabel yang digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia adalah Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kota Batam tahun 2010 – 2017.
3. Objek penelitian di kantor Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Keuangan dan Anggaran Daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam tahun 2010 – 2017?

2. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 – 2017 di Kota Batam?
3. Bagaimana Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam tahun 2010 – 2017.
2. Untuk Mengetahui Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 – 2017 di Kota Batam.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi.
2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah Kota Batam dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor BPS, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai

pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (BPS, 2016:1) Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Namun sebenarnya, ide pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan yang positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan yang sesungguhnya. Dalam aktualisasi konsep pembangunan manusia melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990. Indonesia mulai menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap 3 tahun. Namun, sejak tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut (Ariza, 2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan setiap daerah yang dapat

tercapai dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat.

Dalam melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setiap komponen harus dihitung indeksnya. Komponen tersebut adalah (BPS, 2016:10):

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini (BPS, 2016:22):

1. Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
2. Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
3. Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
4. Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum IPM

No	Komponen IPM	Maks	Min	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3	Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)	100	0	
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720 ^a	300.000 (1996)	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

Sumber: bps.go.id

Menurut (BPS, 2016:11), secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir
- 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)
- 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah).
- 4) IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\text{IPM} = \frac{(\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3)}{3}$$

Rumus 2.1 Penghitungan IPM

Keterangan:

\mathbf{X}_1 = Angka Harapan Hidup (AHH)

\mathbf{X}_2 = Tingkat Pendidikan

\mathbf{X}_3 = Tingkat Kehidupan yang Layak

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang adalah kemiskinan, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemiskinan banyak dihadapi oleh rakyat Indonesia khususnya setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana tingkat kemiskinan cenderung naik dari tahun ke tahun. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Menurut (Suharto, 2009:134) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang dialami seseorang apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi standar kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan maupun kebutuhan selain makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty level*).

Sedangkan (BPS, 2011:6) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Menurut (Tarumingkeng, Rimate, & Oldy Rotinsulu, 2018) kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.

Menurut (Sudantoko & Muliawan, 2009:43) apabila dilihat dari kelompok sasaran, ada terdapat beberapa tipe penggolongan kemiskinan. Penggolongan ini dimaksudkan agar setiap program dapat memiliki sasaran dan terget yang lebih jelas. Kemiskinan dibagi dalam tiga kategori, yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Kemiskinan relatif adalah situasi kemiskinan diatas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non miskin dalam suatu komunitas.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.

2.1.2.1 Indikator kemiskinan

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi atau kapita). Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas yang di kutip dari (BPS, 2011:35), antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Menurut (Dewi, 2017) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

2.1.2.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut (Suharto, 2009:135) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang menghambat seseorang dalam mengakses peluang – peluang yang ada disekitarnya. Secara umum, faktor – faktor penghambat tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam diri orang miskin yang bersangkutan, antara lain meliputi rendahnya tingkat pendidikan, adanya budaya malas, mudah pasrah pada nasib (*fatalistic*), dan kurangnya semangat kerja. Kemiskinan model ini sering diistilahkan dengan kemiskinan budaya.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar kemampuan diri orang miskin. Contohnya, birokrasi dan aturan – aturan yang dapat

menghalangi seseorang dalam mengakses sumber daya. Kemiskinan model ini sering diistilahkan dengan kemiskinan struktural.

Menurut (Dewi, 2017) salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya keberbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Menurut (Sabeni, 2009:16) Menyatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkain tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka – angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut (Marsono, 2009:66) anggaran pemerintah adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi – tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pada pihak lain perkiraan pendapatan yang mungkin diterima dalam masa tertentu.

Menurut (UU Nomor 19, 2001) dan (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29, 2002), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan kedalam dua golongan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran rutin yang setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang – barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari hari, subsidi, pembayaran angusran dan bunga untuk Negara , belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengetasan kemiskinan.

2.1.3.1 Alokasi Dana Bidang Pendidikan

Sumber daya bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa tersebut. Untuk itu

pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh Negara. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, norma – norma, nilai luhur dan cita – cita pun bisa sekaligus tertanam yang ikut andil dalam pembangunan bangsa. Sampai dengan awal dasawarsa 1990-an anggaran pendidikan dibanyak Negara dunia ke tiga menyerap sekitar 15-27 persen dari total pengeluaran pemerintah, begitu pula dengan halnya Indonesia.

Menurut (Yacop, Kumaa, & Niode, 2015) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.

Saat ini pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Kebijakan ini tercantum dalam (UU Nomor 20 Tahun 2003) tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Sebab kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya.

Namun yang menjadi masalah bahwa dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa amanat anggaran pendidikan 20 persen tidak termasuk gaji pendidik dan

biaya pendidikan kedinasan. Tetapi yang jelas anggaran sebesar 20 persen akan sulit dilaksanakan secara langsung. Hal ini tentu saja pemerintah memiliki alasan – alasan yang cukup kuat dan mendasar mengapa Negara belum dapat memenuhi kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut. Perlu juga dipahami dalam mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bukan masalah yang sederhana karena diketahui bahwa ada keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Terkait hal itu, menurut staf ahli Mendikbud bidang pembangunan karakter, Arie Budiman, mendorong pemerintah daerah agar tetap memperhatikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Bahwa kabupaten atau kota bisa mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945. Anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 21 persen. Namun, jika dilihat dari APBD murni, anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen. Untuk di Kepulauan Riau, NPD pada tahun 2016 masih kecil 9,6 persen, kemudian tahun 2017 naik jadi 13,9 persen dan turun lagi di 2018 jadi 13,6 persen.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Zahari & Sudirman, 2017) dengan judul “*The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province*”. Dalam penelitian ini menggunakan data time series data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta data kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari indeks

pembangunan manusia di provinsi Jambi pada tahun 2001 hingga 2015. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Bahtera, Muhammad, & Jamal, 2018) dengan judul “*Panel Analysis on the Effect of Government Expenditure on Education and Health Sector against Poverty Numbers in Aceh 2010-2015*” bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, perbedaan kabupaten dengan kota dan perbedaan daerah induk dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan data sekunder periode 2010-2015. *Tes Chow* menghasilkan kesimpulan bahwa model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa anggaran pendidikan, wilayah perkotaan secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sementara anggaran kesehatan dan perluasan kabupaten / kota tidak berpengaruh pada pengurangan kemiskinan.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Sanggalorang et al., 2015) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara” bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan adalah berganda, dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negative tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Tarumingkeng et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara”, dalam penelitian ini digunakan metode penghitungan kuadran terkecil dimana Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan digunakan dua variabel independen yakni Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan. Data yang diteliti meliputi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Dimana berdasarkan penghitungan semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Dewi, 2017) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”, data yang digunakan adalah data sekunder dengan penampang melintang termasuk data satu tahun di setiap kabupaten di Provinsi Riau pada setiap variabel yang digunakan. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa pertama, Kemiskinan berpengaruh signifikan pada indeks pembangunan

manusia di provinsi Riau. artinya setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Provinsi Riau. Kedua, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada indeks pembangunan manusia di provinsi Riau. Artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi persentase IPM di Provinsi Riau.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Chalid & Yusuf, 2014) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Data sekunder yang digunakan adalah data Panel tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Laisina, Masinambow, & Rompas, 2015) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian deskriptif, dengan menggunakan analisis jalur. Data yang digunakan di peroleh dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di Sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Ulupui, 2015) yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia” menunjukkan hasil bahwa PAD secara konsisten mampu meningkatkan IPM sesuai dengan hasil yang diperoleh. DAK mampu meningkatkan IPM. Dengan adanya peningkatan PAD dan DAK suatu daerah, maka IPM akan meningkat. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM .

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Muliza, Zulham, & Seftarita, 2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Beanja Pendidikan, Beanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh.”. Data yang digunakan adalah data panel selama periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh (Kahang, Saleh, & Suharto, 2016) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kutai Timur”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan pemerintah tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendorong indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

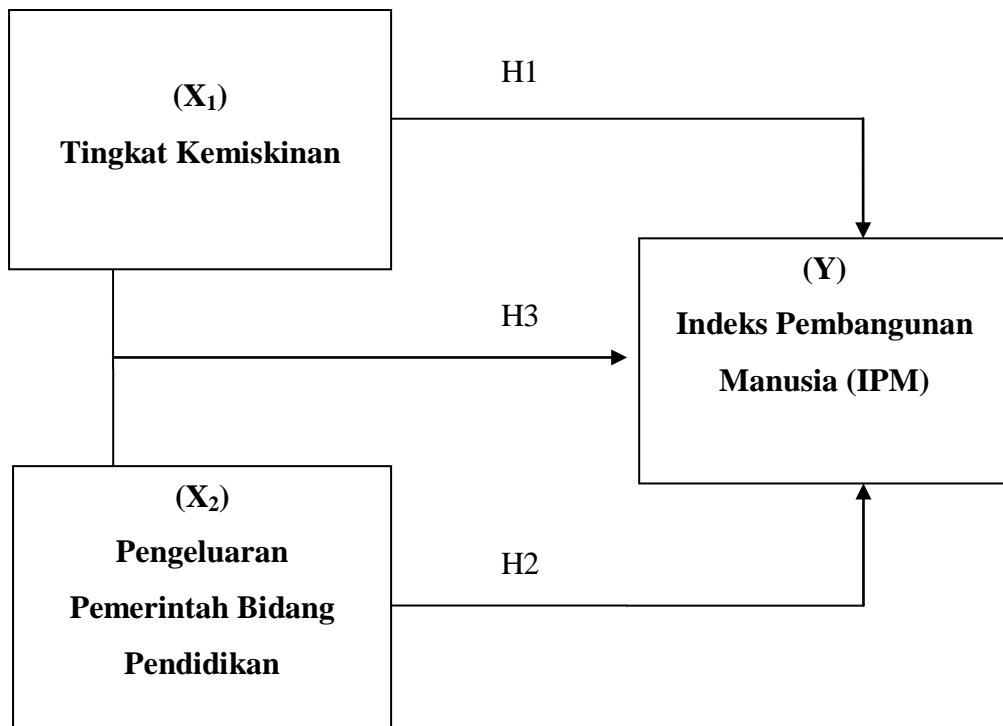
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
(Zahari & Sudirman, 2017)	<i>The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province</i>	<i>Government Expenditures in Education and Health, Human Development Index</i>	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
(Bahtera et al., 2018)	<i>Panel Analysis on the Effect of Government Expenditure on Education and Health Sector against Poverty Numbers in Aceh 2010-2015</i>	<i>Government Expenditure on Education and Health Sector, Poverty Numbers</i>	Anggaran pendidikan, wilayah perkotaan secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara anggaran kesehatan dan perluasan kabupaten / kota tidak berpengaruh pada pengurangan kemiskinan
(Sanggalorang et al., 2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara	Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negative dan secara statistic tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
(Tarumingken et al., 2018)	Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara	Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Belanja modal dan kemiskinan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

(Dewi, 2017)	Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau
(Chalid & Yusuf, 2014)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia \	IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan laju pertumbuhan ekonomi	Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM
(Laisina et al., 2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pada sektor Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang berisi fakta-fakta hasil observasi. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variable satu dengan variable lainnya dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut kemudian dijelaskan lagi secara rinci dan nyata sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan suatu kerangka berpikir yang menyatakan bahwa Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Kota Batam. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan – kesimpulan teoritis – teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis menurut (Sugiyono, 2013:96) pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
- H₂: Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
- H₃: Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.

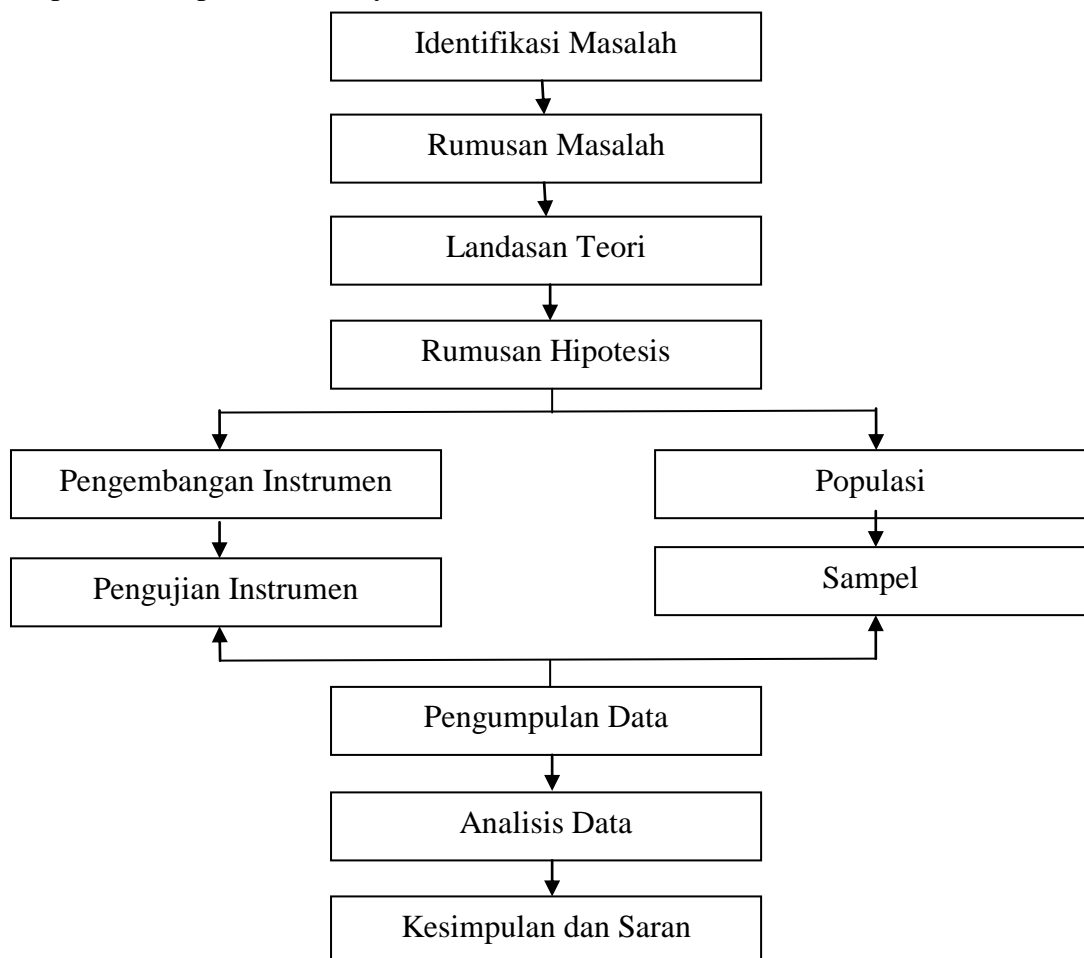
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk mencapai target yang maksimal dalam kegiatan penelitian maka dilakukan beberapa tahapan sistematis dan terencana yang terdiri atas tahapan persiapan yang dilakukan dengan membuat proposal penelitian untuk di meneliti dan mengambil data di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.

Adapun desain penelitian ini yaitu:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel merupakan segala sesuatu apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga sering disebut variabel stimulus. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat kemiskinan sebagai X1 dan Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan sebagai X2.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Dependen			
IPM (Y)	Pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia (BPS, 2016:10).	Angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah.	Nominal
Independen			
Tingkat Kemiskinan (X1)	Kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Tarumingkeng et al., 2018).	Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).	Nominal
Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X2)	Jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan (UU Nomor 20, 2003)	Dana yang dialokasikan untuk membiayai pendidikan khususnya di kota Batam.	Nominal

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* atau deretan waktu mengenai data tingkat kemiskinan, laporan keuangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan data indeks pembangunan manusia periode 2010 – 2017.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* per 4 bulanan selama periode 2010 - 2017, yaitu sebanyak 32 sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam sebuah penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Menurut (Sugiyono, 2013:224) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasi data sekunder yang diperlukan berupa laporan keuangan yang

diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Batam serta studi kepustakaan untuk mencari referensi dari buku – buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal – jurnal ilmiah yang sejalan dengan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2013:187) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, sumber data ini lebih banyak digunakan sebagai data yang sudah diolah oleh suatu instansi atau badan sehingga data sudah siap dan perlu untuk diolah kembali. Data dalam bentuk statistik biasanya tersedia di kantor – kantor pemerintahan, perusahaan swasta, atau badan yang berhubungan dengan penggunaan data.

Pengumpulan data adalah aktifitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik dokumen ini untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi, maupun kelembagaan. Data pada dokumen ini juga berasal dari data laporan keuangan.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka – angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu:

- a. Informasi mengenai tingkat kemiskinan
- b. Informasi mengenai pengeluaran pemerintah bidang pendidikan
- c. Informasi mengenai IPM

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Internal

Data internal merupakan data yang didapat dari suatu organisasi. Contohnya seperti data laporan perusahaan.

b. Data Eksternal

Data eksternal merupakan data yang didapat dari luar suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti data informasi dari penelitian referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang paling kritis sebagai bahan pembuktian semua asumsi dan hipotesis yang di uji. Data akan menjadi informasi yang mempunyai arti bila analisis penyajian dapat digunakan pada saat pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dibantu dengan program computer yaitu SPSS versi 25.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2013:147) statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif ini biasanya meliputi kegiatan berupa penyajian data yang berupa grafik dan tabel.

Dan melakukan kegiatan peringkasan data dan penjelasan data, berupa letak data, bentuk data dan variasi data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik Regresi

Pengujian asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar – benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala autokorelasi. Model regresi dapat dijadikan alat estimasi jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat heterokedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas. Jika terdapat heterokedastisitas, maka varian tidak boleh konstan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *standart error*. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian – pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut penting karena bila data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametric. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogoriv-Smirnov* dalam SPSS.

Menurut (Sugiyono, 2013:239), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significant*), yaitu:

- a. Jika Probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
- b. Jika Probabilitas < 0.05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode - metode grafik normal *probability plots* dalam program SPSS dasar pengambilan keputusan

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleransi serta *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% .Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat

dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercayadan objektif.

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013:139).

Menurut (Ghozali, 2013:142) untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Kemudian deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dasar dari analisis heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu (seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013:111). Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Durbin-Watson*. *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

- H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
- H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Menurut (Santoso, 2012:241) untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi, ada pertimbangan kriteria pengujian *Durbin – Watson* yang harus dipatuhi, antara lain:

- a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif.
- b. Bila angka DW -2 sampai dengan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Bila angka DW $> +2$ berarti ada autokorelasi yang negative.

3.5.3 Uji Pengaruh

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dimana pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang

hamper sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan yang dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas yang jumlahnya lebih dari satu buah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel – variabel yang memiliki; hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap, variabel yang dijelaskan atau variabel dependen.

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2013:277). Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya nilai masing – masing variabel independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi.

Menurut (Sugiyono, 2013:277) untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen (Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Rumus 3.1 Persamaan regresi

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia

a : Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2 \dots X_n = 0$)

b_1 : Koefisien Tingkat Kemiskinan

b_2 : Koefisien Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

X_1 : Tingkat Kemiskinan

X_2 : Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

e : *error*

Besarnya konstanta dalam a dan besarnya koefisien regresi masing – masing variabel independen yang ditunjukkan X_1 dan X_2 . Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain tidak berubah (Sugiyono, 2013:250). Tahap pengujian yang dilakukan, yaitu:

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_a = Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.
3. Tingkat pengujian :

Jika $-t_{tabel} > t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
4. Menentukan nilai t_{hitung} .
5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $df = N - k$.
6. Menarik kesimpulan.

3.5.4.2 Uji F (Secara simultan)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat (Sugiyono, 2013:257). Uji signifikansi dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_a = Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.

3. Tingkat pengujian :

Jika $- F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $- F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Menentukan nilai F_{hitung} .

5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $df (N1) = k-1$ pembilang = k dan dk penyebut $df (N2) = N - k$ dimana k = variabel bebas.

6. Menarik kesimpulan.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Menurut (Ghozali, 2013:97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang terbaik dalam analisis regresi dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel independen akan mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab – sebab lain diluar model. Nilai koefisien R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 mendekati 1, semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan pengertian diatas, maka koefisien determinasi merupakan bagian dari keragaman total dari variabel tak independen dihitung dengan koefisien determinasi dengan asumsi dasar factor-faktor lain diluar variabel dianggap tetap atau konstan.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Badan Pusat Statistik Kota Batam.

